

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian dan Investasi Terhadap Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu

Government's Expenditure Effect of Agricultural Sector and Investment on Labor, Economic Growth, and Local Revenue of Luwu Regency

Andi M. Iswan Adhiputra Pangerang¹, Wilda Fatmala^{2*}, Filasti Rahma³, Yunarsi⁴, Husriah⁵

¹ Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Palopo, Palopo, Indonesia

² Politeknik Baubau, Baubau, Indonesia

³ Politeknik Baubau, Baubau, Indonesia

⁴ Politeknik Baubau, Baubau, Indonesia

⁵ Politeknik Baubau, Baubau, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 8 April 2022

Revised: 25 April 2022

Accepted: 13 Mei 2022

KEYWORD

Investasi, Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja

Investment, Local Revenue, Government Expenditure, Economic Growth and Labor.

CORRESPONDING AUTHOR

Nama : Wilda Fatmala, S. Sos., M.Si.

Address: Jl. Bulawambona No.35

E-mail : wildafatmala.wf@gmail.com

No. Tlp : 082193279305

A B S T R A C T

Pengalokasian anggaran yang besar dan luasnya lahan pertanian di Kabupaten Luwu, diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Luwu dan menarik investor. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu secara tidak langsung melalui tenaga kerja sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi; dan (2) mengkaji dan menganalisis pengaruh investasi swasta terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu secara langsung maupun tidak langsung melalui tenaga kerja sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu *time series* selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2013 (10 Tahun) yang dikumpulkan dengan melakukan telaah dokumentasi. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu, pengeluaran Pemerintah pada sektor pertanian Kabupaten Luwu dan data Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2000 Kabupaten Luwu. Penelitian ini menjadikan pendapatan asli daerah sebagai variabel independen, pengeluaran pemerintah dan investasi sebagai variabel dependen dan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Untuk menjawab tujuan pada penelitian ini dilakukan dianalisis menggunakan model regresi persamaan simultan (*simultaneous equation model*). Hasil pengolahan data dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pertanian secara tidak langsung memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa investasi baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu.

The large budget allocation and agricultural area of luwu county is expected to create jobs for the people of luwu district and attract investors. The deployment of the large budget and the extent of the development of the research is aimed at (1) reviewing and analyzing the impact of government spending on the agricultural sector on luwu's native incomes indirectly through agricultural sector labor and economic growth; And (2) review and analyze the impact of private investment on luwu county's local revenue and indirectly through agricultural sector labor and economic growth. The study used a secondary type of the time series during the 2004 to 2013 (10 years) collected by the files.

The government expenditure in luwu district's agricultural sector and the gross domestic product data on the basis of the 2000 luwu district's constant price. The research makes real incomes independent variables, government spending and investment as dependent variables and labor and economic growth as intering variables. To answer the purpose of the study is done analysis using simultaneous equation model. The results of the data processing in this study suggest that government spending on agriculture was indirectly significant to the local revenue Luwu district. In addition, the research also suggests that investments both directly and indirectly give significant impact to the original income in luwu district.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi di era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Otonomi daerah merupakan realisasi dari ide desentralisasi, dimana Otonomi daerah merupakan proses pelimpahan dan penyerahan kewenangan dengan asas desentralisasi (Hendra Karianga, 2013). Widjaja dalam (Fatmala, 2020) mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan desentralisasi antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam pertumbuhan. Agar tujuan desentralisasi tersebut dapat tercapai, menurut Bird dan Vaillancourt dalam (Fatmala, 2020), ada dua syarat penting untuk kesuksesan desentralisasi, yaitu: (1) proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, yaitu pengambilan keputusan tentang manfaat dan biayanya harus transparan dan pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk memengaruhi keputusan-keputusan tersebut; (2) yang lebih sesuai dengan rancangan kebijakan biaya dari keputusan yang diambil, sepenuhnya harus ditanggung oleh masyarakat setempat.

Menurut Sidik dalam (Rudy Badrudin, 2012), konsep desentralisasi terdiri dari atas desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*). Selanjutnya, melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan menurut potensi masing-masing. Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk mendorong perekonomian daerah dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia (Mega Christia & Ispriyarso, n.d. 2019). Kebebasan pemerintah daerah dalam mengelola dana transfer yang

diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah akan tercapai dengan baik dan akan berimbas kepada kesejahteraan (Hendra Kusuma, 2016). Menurut Saragih, Mardiasmo, dan Reksohadiprodjo dalam (Rudy Badrudin, 2012) otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Menurut (Susanti, 2008) dengan adanya desentralisasi fiskal daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerahnya sehingga mampu bersaing dengan daerah lain melalui penghimpunan modal pemerintah daerah untuk kebutuhan investasi dan atau kemampuan berinteraksi dengan daerah lain.

Selanjutnya, apakah desentralisasi fiskal memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi? Dari perspektif teoritis, (Wallace e. Oates, n.d.) dan (Tiebout, 1956) menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dalam (Rustan A., 2013) bahwa sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia, masalah tentang desentralisasi fiskal cukup menarik untuk dibahas. Alasannya adalah telah terjadi perubahan dalam skema desentralisasi fiskal saat ini yang memberikan dana perimbangan begitu besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ditambah beberapa perluasan sumber-sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah. Selain itu, dengan alasan bahwa desentralisasi memberikan otonomi yang cukup luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, Sehingga dapat diasumsikan bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih efektif. Hal sejalan dengan (Tiebout, 1956) yang menyebutkan bahwa terdapat dua gagasan fundamental ekonomi dibalik desentralisasi

fiskal yaitu, (1) melalui desentralisasi, efisiensi ekonomi dapat ditingkatkan karena pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik, dan (2) kompetisi dalam penyediaan pelayanan publik dan mobilitas penduduk antar pemerintah daerah akan terjadi dalam rangka untuk menyesuaikan dan mencocokkan antara preferensi masyarakat dengan pemerintah daerah.

Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan desentralisasi Pemerintah Daerah lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal (*local needs and local demand*) sehingga *service delivery* makin responsif dan mampu mengantarkan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Wallace e. Oates, n.d.), (Jorge Martinez-Vazquez & Robert M. McNab, 2001), dimana diungkapkan bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong efisiensi ekonomi dan secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Mereka berargumen bahwa pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena daerah mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing. (Sukirno, 2013), pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui melalui instrument anggaran. Pengeluaran pemerintah dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk peningkatan layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman, dan lingkungan hidup, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Rosen, 2014) dan (Sukirno, 2013). Jadi berdasarkan beberapa pandangan di atas, menunjukkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan dana kepada sektor ekonomi secara efisien daripada dilakukan pemerintah pusat. Tetapi, tidak akan terjadi jika desentralisasi fiskal tidak berjalan secara efektif (Jorge Martinez-Vazquez & Robert M. McNab, 2001). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Simanjuntak, 2010), bahwa potret perekonomian nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun memang sejalan

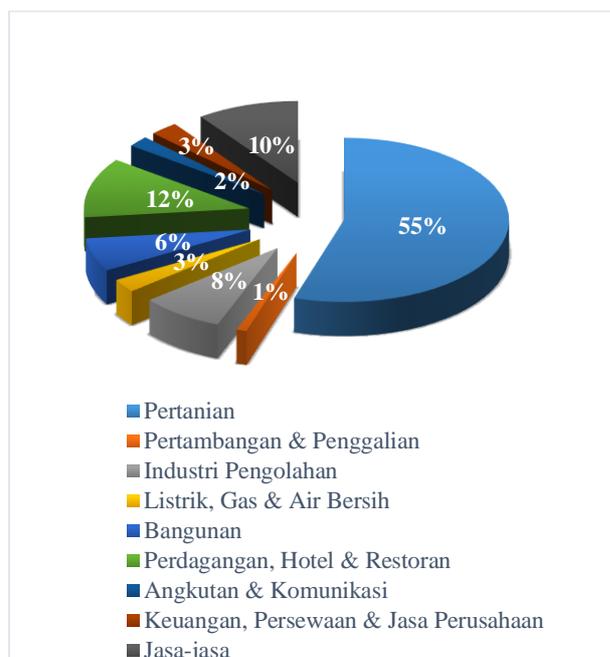
dengan peningkatan sumber-sumber pendanaan daerah, karena desentralisasi fiskal.

Upaya membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, daerah-daerah di Indonesia melakukan berbagai upaya dan usaha melalui pembangunan pada sektor-sektor perekonomian. (Todaro, 2011), pembangunan merupakan suatu proses perbaikan yang dilakukan secara terus menerus (berkesinambungan) pada suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik. Menurut Katz dalam Ashari, dkk (2015) bahwa pembangunan sebagai "*dynamic change of a whole society form one state of national being to another, with the connotation that the state is preferable*". Dalam konsep ini, ada empat aspek yang perlu dicatat, yakni: (1) pembangunan adalah perubahan yang bersifat dinamis (*a dynamic change*); (2) perubahan tidak hanya terjadi pada sekelompok orang atau sesuatu wilayah saja, tetapi berlangsung dalam seluruh masyarakat (*a whole society*); (3) perubahan berlangsung secara bertahap, dari suatu keadaan ke keadaan yang baru; dan (4) keadaan yang baru lebih disukai daripada keadaan sebelumnya. Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, yang diukur dari perbedaan produk domestik bruto tahun tertentu dengan tahun sebelumnya

Upaya membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, juga dilakukan oleh Kabupaten Luwu. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan mendukung sektor-sektor usaha dan investasi. Sektor usaha yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah Kabupaten Luwu adalah sektor pertanian. Dimana dalam (Welley et al., 2015) dikemukakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan. Sektor pertanian merupakan tonggak utama dalam pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Sektor pertanian sebagai sektor usaha prioritas di Kabupaten Luwu dapat ditunjukkan melalui besarnya pengalokasian anggaran pada sektor pertanian yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Besarnya pengalokasian anggaran pada sektor pertanian dengan pertimbangan potensi lahan pertanian yang

besar. Besarnya alokasi anggaran sektor pertanian Kabupaten Luwu tercermin juga pada besarnya kontribusi sektor pertanian dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah (Jolianis et al., 2012). Besarnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Luwu dapat dilihat pada gambar berikut:

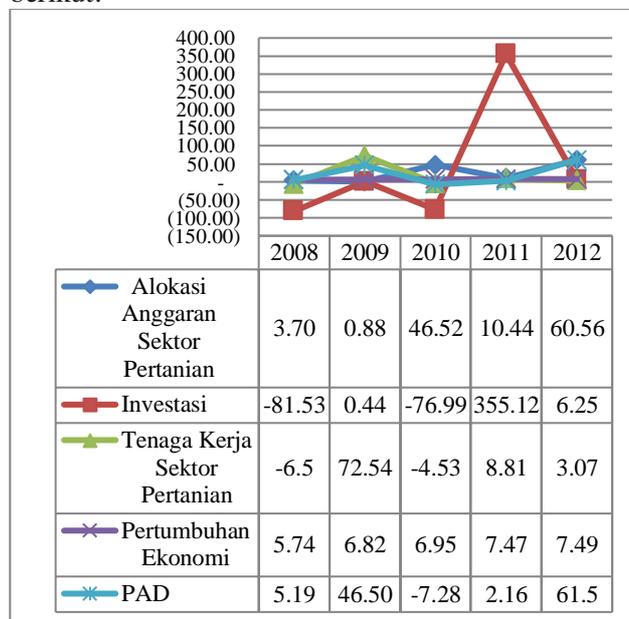


Gambar 1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2012 (%)

Pengalokasian anggaran yang besar dan luasnya lahan pertanian di Kabupaten Luwu, diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Luwu dan menarik investor swasta untuk berinvestasi yang pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian di Kabupaten Luwu. Untuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja menurut Keynes perlu menambah pengeluaran supaya pengusaha menaikkan investasi yang akan menaikkan permintaan tenaga kerja (Wahyudi, 2020). Hal ini sejalan dengan (Syaukani HR, 2012) bahwa penciptaan lapangan kerja merupakan masalah yang sangat esensial karena memiliki *multiplier effect* yang tinggi sekali. Lapangan kerja atau kesempatan kerja berkaitan erat dengan dua dimensi ekonomi yang sangat esensial, yaitu peningkatan daya beli dan kecenderungan untuk menabung. Daya beli meningkat artinya pajak penjualan atas barang dan jasa juga meningkat

dan hal ini juga akan meningkatkan pendapatan daerah dan negara.

Adapun perkembangan perekonomian Kabupaten Luwu yang diukur melalui besarnya pertumbuhan alokasi anggaran khususnya sektor pertanian, tenaga kerja, PDRB atas dasar harga konstan, investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Pertumbuhan Alokasi Anggaran Sektor Pertanian, Investasi, Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi dan PAD Tahun 2008-2012 (%)

Penelitian ini menekankan pada sektor pertanian yang memiliki proporsi pengeluaran terbesar dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sehingga, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pada sektor pertanian, investasi terhadap tenaga kerja dan PDRB yang memungkinkan bagi peningkatan pada PAD Kabupaten Luwu.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu time series selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2013 (10 Tahun) yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu, pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian Kabupaten Luwu dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan 2000 Kabupaten Luwu.

Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku laporan tahunan beberapa terbitan seperti Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu yang bersumber dari Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu dan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu serta Kabupaten Luwu dalam Angka yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu dan juga diperoleh dari beberapa terbitan yang dapat menunjang penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui telaah dokumentasi; yaitu dilakukan dengan meneliti dan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan kepentingan penelitian, yakni data yang menyangkut keseluruhan komponen data yang dibatasi dalam jangka waktu 10 tahun pengamatan yakni tahun 2004 sampai dengan 2013.

Model Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan perlu dianalisis lebih lanjut untuk menjadikannya suatu informasi yang berguna. Penelitian ini dianalisis menggunakan model regresi persamaan simultan (*simultaneous equation model*). Model ini merupakan pengembangan dari model regresi.

Adapun hubungan fungsional antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y_1 = f(X_1, X_2)$$

$$Y_2 = f(X_1, X_2, Y_1)$$

$$Y_3 = f(X_2, Y_2)$$

Dimana:

X_1 = pengeluaran pemerintah sektor pertanian

X_2 = investasi

Y_1 = tenaga Kerja

Y_2 = produk domestik regional bruto

Y_3 = pendapatan asli daerah (PAD)

Dari hasil perhitungan menggunakan matriks dan *cramer's rule* didapatkan persamaan berikut:

$$\ln Y_1 = \theta_0 + \theta_1 \ln X_1 + \theta_2 \ln X_2 + \epsilon_1$$

$$Y_2 = \lambda_0 + \lambda_1 \ln X_1 + \lambda_2 \ln X_2 + \epsilon_2$$

$$\ln Y_3 = \theta_0 + \theta_1 \ln X_1 + \theta_2 \ln X_2 + \epsilon_3$$

Dimana:

$$\theta_0 = \frac{1}{1 - \alpha_3 \beta_3} \ln \alpha_0 + \frac{\alpha_3}{1 - \alpha_3 \beta_3} \ln \beta_0$$

$$\theta_1 = \frac{\alpha_1}{1 - \alpha_3 \beta_3} + \frac{\beta_1 \alpha_3}{1 - \alpha_3 \beta_3}$$

$$\theta_2 = \frac{\alpha_2 + \alpha_3 \beta_2}{1 - \alpha_3 \beta_3}$$

$$\epsilon_1 = \frac{\mu_1 + \alpha_3 \beta_2}{1 - \alpha_3 \beta_3}$$

$$\lambda_0 = \frac{\beta_3}{1 - \alpha_3 \beta_3} \ln \alpha_0 + \frac{1}{1 - \alpha_3 \beta_3} \ln \beta_0$$

$$\lambda_1 = \frac{\alpha_1 \beta_3}{1 - \alpha_2 \beta_3} + \frac{\beta_1}{1 - \alpha_3 \beta_3}$$

$$\lambda_2 = \frac{\alpha_2 \beta_3}{1 - \alpha_3 \beta_3} + \frac{\beta_2}{1 - \alpha_3 \beta_3}$$

$$\epsilon_1 = \frac{\beta_3 \mu_1 + \mu_2}{1 - \alpha_3 \beta_3}$$

$$\theta_0 = \frac{\beta_3 \delta_2}{1 - \alpha_3 \beta_3} \ln \alpha_0 + \frac{\delta_2}{1 - \alpha_3 \beta_3} \ln \beta_0 + \ln \delta_0$$

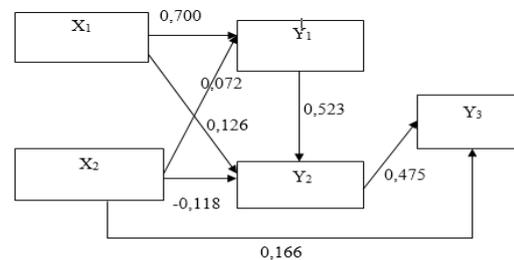
$$\theta_1 = \frac{\alpha_1 \beta_3 \delta_2}{1 - \alpha_3 \beta_3} + \frac{\beta_1 \delta_2}{1 - \alpha_3 \beta_3}$$

$$\theta_2 = \frac{\alpha_2 \beta_3 \delta_2}{1 - \alpha_3 \beta_3} + \frac{\beta_2 \delta_2}{1 - \alpha_3 \beta_3} + \delta_1$$

$$\epsilon_1 = \frac{\beta_3 \delta_2 \mu_1}{1 - \alpha_3 \beta_3} + \frac{\delta_2 \mu_2}{1 - \alpha_3 \beta_3} + \mu_3$$

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil estimasi pengaruh langsung, tidak langsung dan total pengaruh dari pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian dan investasi swasta terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu melalui penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi secara sederhana dalam model SEM dapat dilihat berdasarkan nilai-nilai koefisien estimasi pada masing-masing jalur pada gambar berikut:



Gambar 3. Hasil Analisis Koefisien

Berdasarkan hasil pengolahan atas data dalam penelitian ini, sehingga diperoleh hasil estimasi pengaruh langsung pengeluaran pemerintah (X_1) terhadap tenaga kerja (Y_1) sebesar 0,700, hal ini berarti ketika pengeluaran pemerintah meningkat 1 persen, maka akan meningkatkan tenaga kerja sebesar 0,700 persen dengan nilai probabilitas sebesar 0,003. Dengan kata lain, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja. Sedangkan hasil estimasi pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2) melalui tenaga kerja (Y_1) menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Tidak signifikannya pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2) melalui tenaga kerja (Y_1), juga ditunjukkan oleh hasil

estimasi pengaruh langsung pengeluaran pemerintah (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2), pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi (Y2) terhadap pendapatan asli daerah (Y3) dan pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, hasil estimasi pengaruh langsung investasi (X2) terhadap tenaga kerja (Y1) menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Tidak signifikannya pengaruh langsung investasi (X2) terhadap tenaga kerja (Y1), juga ditunjukkan oleh pengaruh langsung tenaga kerja (Y1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2), pengaruh tidak langsung tenaga kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pertumbuhan ekonomi, pengaruh tidak langsung investasi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tenaga kerja, pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi (Y2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y3), pengaruh tidak langsung investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pertumbuhan ekonomi, pengaruh langsung investasi (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) dan pengaruh langsung investasi (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y3).

Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini, diketahui bahwa pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah sektor pertanian (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) melalui tenaga kerja (Y1) menunjukkan pengaruh yang signifikan. Di mana hal ini sejalan dengan pendapat Todaro (2004), yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestik lebih besar. Selain itu, pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu melalui pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Karlina Batik, 2013), yang mengemukakan bahwa hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan, sehingga akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah

kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Selanjutnya, pengaruh tidak langsung investasi (X2) terhadap pendapatan asli daerah (Y3) melalui pertumbuhan ekonomi (Y1) dan tenaga kerja (Y1) menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Hal ini bertentangan dengan pendapat Batik Karlina (2013), bahwa hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya. Adapun indikasi penyebab dari tidak signifikannya pengaruh tidak langsung investasi terhadap pendapatan asli daerah melalui tenaga kerja sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi adalah bahwa pada dasarnya kontribusi investasi di Kabupaten Luwu belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi begitu pula halnya pada pendapatan asli daerah. Hal ini juga dapat dilihat dari data yang diperoleh, bahwa meskipun investasi di Kabupaten Luwu mengalami penurunan, PDRB di Kabupaten Luwu tetap mengalami pertumbuhan dan begitu pula halnya pada pendapatan asli daerah. Sebaliknya, meskipun investasi mengalami peningkatan di tahun tertentu namun di tahun yang sama pendapatan asli daerah justru menunjukkan adanya penurunan. Selain itu, dari hasil estimasi pengaruh langsung investasi (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y3) diketahui bahwa investasi (X2) memiliki pengaruh tidak signifikan. Tidak signifikannya pengaruh langsung diberikan oleh investasi terhadap pendapatan asli daerah pada dasarnya disebabkan oleh bahwa pada dasarnya kontribusi investasi di Kabupaten Luwu belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah. Hal ini juga dapat dilihat dari data yang diperoleh, bahwa meskipun investasi di Kabupaten Luwu mengalami penurunan, pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu tetap mengalami pertumbuhan. Sebaliknya, meskipun investasi mengalami peningkatan di tahun tertentu namun di tahun yang sama pendapatan asli daerah justru menunjukkan adanya penurunan.

PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan analisis mengenai analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian dan investasi terhadap tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu, maka kesimpulan yang diperoleh adalah pengaruh langsung pengeluaran pemerintah sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu melalui pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan. Sedangkan pengaruh tidak langsung investasi terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi dan pengaruh langsung investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan pengaruh tidak signifikan.

Bertolak dari kesimpulan di atas maka penulis menyarankan agar pengeluaran pemerintah sektor pertanian memberikan pengaruh yang paling signifikan terhadap peningkatan tenaga kerja di Kabupaten Luwu, oleh karena itu disarankan kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Luwu untuk memberi prioritas pada peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pertanian sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi sektor pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan meninjau kembali kebijakan mengenai investasi dalam kaitannya dengan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah. Dianggap perlu untuk mengkaji lagi penelitian ini dengan menggunakan model pendekatan, serta konsep peninjauan yang berbeda agar dapat dilakukan studi komparasi dan mendukung adanya temuan-temuan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatmala, W. (2020). *Pengaruh Sektor Ekonomi Dominan Terhadap Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara* (Vol. 8).
- Hendra Karianga. (2013). *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kencana Prenadamedia group.
- Hendra Kusuma. (2016). *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*.
- Jolianis, Asrizal Asrizal, & Fitria Wulandari. (2012). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2005-2012)*.
- Jorge Martinez-Vazquez, & Robert M. McNab. (2001). Cross-country evidence on the relationship between fiscal decentralization, inflation, and growth. *National Tax Association*.
- Karlina Batik. (2013). Analisis Pengaruh investasi, Pdrb, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekonomi Pembanguna*.
- Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (n.d.). *Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*.
- Rosen, H. S. (2014). Public Finance, Tenth Edition, Global Edition. *The McGraw-Hill Series in Economics*.
- Rudy badrudin. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanjamodal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. In *Universitas Air Langga*.
- Rustan A. (2013). *Desentralisasi Fiskal Serta Kaitannya Dengan Otonomi Daerah Fiscal Decentralization And Economic Growth, And The Relation With Regional Autonomy*.
- Simanjuntak, R. A. (2010). *Desentralisasi Fiskal Dan Manajemen Makro Ekonomi: Urgensi Suatu Grand Design Di Indonesia*. hal. 35-57.
- Sukirno, S. (2013). *Pengantar Teori Makroekonomi*. PT. Raja Garfindo Persada.
- Susanti. (2008). *Desentralisasi Fiskal Daerah*.
- Syaukani HR, dkk. (2012). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=8627880292831872073&hl=en&oi=scholar>
- Tiebout, C. M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political*

Economy, 64(5), 416–424.

<https://doi.org/10.1086/257839>

Todaro, M. P. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*. erlangga.

Wahyudi. (2020). *Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia*.

Wallace e. Oates. (n.d.). Fiscal Decentralization And Economic Development. *University of Chicago Press Journals*.

Welley, M., Faktor-Faktor, V. U., Mempengaruhi..., Y., Welley, M., Untu, V., Ekonomi, F., Bisnis, D., Manajemen, J., Sam, U., & Manado, R. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Di Sektor Pertanian Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013 The Factors That Influenced Company Value In Agriculture Sector Companies At Indonesia Stock Exchange Year 2010-2013 Oleh. *Jurnal EMBA* 972, 3(1), 972–983.